

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan suatu negara. Secara agregat pertumbuhan ekonomi dilihat dari pencapaian nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Todaro (2006:118) membagi tiga komponen penting pertumbuhan ekonomi, pertama adalah akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja. Kedua, pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi atau cara-cara baru menyelesaikan pekerjaan (Nurlaili, 2018).

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010).

Menurut Todaro (2010) mengatakan bahwa, meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberikan jawaban atas berbagai macam persoalan kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting setiap

-

program pembangunan realistis yang sengaja dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan pesat namun pertumbuhan yang pesat ini telah membawa akibat yang mengkhawatirkan, yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih buruk (Al Faizah, 2018).

Permasalahan yang sering muncul dan yang sering terjadi di negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapat antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan.

Indikator yang sering dijadikan tolak ukur dalam melihat ketimpangan adalah pendapatan perkapita masyarakatnya. Masyarakat dengan pendapatan perkapita yang tinggi akan lebih mudah aksesnya dalam segala hal, misalnya keinginan memiliki harta, tidak ada keterbatasan dalam hal mengkonsumsi dan lain sebagainya, akan tetapi jika pendapatan perkapitanya rendah maka aksespun akan menjadi terhambat seperti keterbatasan dalam memiliki harta, jumlah konsumsi yang rendah, pendidikan dan kesehatan juga kurang terjamin (Matondang, 2018).

Perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap wilayah atau daerah maka hal tersebut yang menjadi penghambat dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya yang melimpah. Kekayaan alam yang melimpah seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kekayaan alam yang berlebih tersebut

-

diharapkan memberikan dampak penyebaran (trickledowneffect). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki seluruh Provinsi di Indonesia secara merata. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan antar wilayah.

Ketimpangan pendapatan bisa terjadi sesama individu, sektor maupun daerah. Ketimpangan pendapatan di setiap daerah disebabkan perbedaan komposisi jumlah penduduk, sumberdaya yang ada dan karakteristik setiap daerah. Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan pendapatan antara masyarakat maupun daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Kesenjangan antar daerah telah menjadi fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat, terutama Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk dimana kondisi geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu daerah (Irawan, 2015).

Salah satu ukuran peningkatan pencapaian proses pembangunan, stabilitas atau membaiknya ketimpangan pendapatan dalam sebuah negara adalah dengan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang stabil dipengaruhi oleh stabilitas politik. Tetapi jika ketidakstabilan politik terjadi di suatu negara akan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang tinggi dan penurunan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Ketidaksatabilan politik salah satunya dapat terjadi dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atau penyalahgunaan jabatan politik. Pelanggaran atau penyalahgunaan politik yang paling sering terjadi dan kemudian menjadi fenomena umum di banyak negara adalah korupsi. korupsi memang selalu menjadi isu hangat dalam penyelenggaraan

pemerintah. Secara mendunia, korupsi sudah disepakati sebagai tindak pidana yang menjadi musuh dan penyakit bagi seluruh bangsa di seluruh negara di dunia. Korupsi tidak mengenal negara maju maupun negara miskin, karena korupsi sudah tumbuh dan mengakar bahkan menjadi budaya hampir di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin (Andiani, 2018).

Kesenjangan pendapatan dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan dan migrasi modal antar daerah depresi dengan daerah sejahtera serta memburuknya perdagangan agregat. Adanya ketimpangan dalam suatu daerah akan mendorong daerah yang tertinggal untuk membangun perekonomian di daerahnya agar tidak terdapat jurang yang besar dengan daerah maju. Tingkat ketimpangan antar daerah dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial merupakan suatu proses pertumbuhan di semua negara tanpa bisa mengidentifikasi dengan model pembangunan yang satu atau lainnya (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini

menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah/wilayah.

Indonesia mengindikasikan bahwasannya naik turunnya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh nilai IPM. Dengan demikian IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia. IPM yang tidak merata di berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relative lebih maju akibat dari kualitas manusianya yang lebih baik dan ada daerah yang relative tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah. Hal ini akan mendorong tidak seimbang pembangunan yang terjadi.

Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks persepsi korupsi dan indeks pembangunan manusia, antara lain yaitu:

Faktor pertama yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian yang telah dilakukan Kuznets, menyimpulkan bahwa korelasi pertumbuhan dan ketimpangan sangat kuat, pada permulaannya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan yang disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat juga akan menyebabkan meningkatnya angka ketimpangan pendapatan, dimana pendapatan yang tercipta cenderung mengumpul pada wilayah yang mempunyai faktor-faktor produksi lebih banyak (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).

Faktor kedua adalah tingkat kemiskinan. Masalah ketimpangan sering memicu kemiskinan di Indonesia karena mereka yang kaya akan cenderung

semakin kaya dan mereka yang miskin akan cenderung semakin miskin. Adanya perbedaan pendapatan yang ekstrim ini membuat masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dapat dikatakan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan distribusi pendapatan, karena semakin ada jarak antara individu kaya dengan individu miskin dan mereka masyarakat miskin akan semakin kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akan lebih mudah untuk masuk kedalam garis kemiskinan (Dias Widya Ningtyas, 2017).

Faktor ketiga penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan adalah korupsi. Korupsi dipandang sebagai kegagalan mekanisme pasar, ditandai dengan adanya peluang bagi pelaku pasar untuk mendapatkan profit yang setinggi-tingginya dengan cara melanggar hukum dan memanfaatkan celah yang ada pada peraturan. Korupsi sebagai salah satu faktor terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Studi menggunakan koefisien gini yang dilakukan oleh Gupta, Devodi dan Alonso sebagai metode pengukuran terlihat bahwa dari indeks tersebut diketahui bahwa korupsi mengakibatkan semakin lebarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini ditunjukkan dari semakin besarnya angka koefisien gini seiring dengan kejadian korupsi. Literature internasional menemukan bahwa korupsi meningkatkan ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah (Policardo, Sanchez Carrera, & Risso, 2019).

Faktor terakhir yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya angka Indeks pembangunan manusia menyebabkan produktivitas yang di hasilkan oleh masyarakat juga menurun dan kemudian berdampak pada pendapatan masyarakat yang juga mengalami penurunan. namun apabila angka indeks pembangunan manusia

mengalami peningkatan akan membuat produktivitas masyarakat akan meningkat dan kemudian membuat pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan. Namun kenyataannya setiap daerah memiliki indeks pembangunan yang berbeda-beda pula sehingga membuat indeks pembangunan manusia juga berkaitan erat dengan adanya ketimpangan pendapatan (Pradnyadewi&Purbadharmaja, 2017).

Tabel 1.1:
Data Ketimpangan Pendapatan yang di Ukur dengan Gini Rasio, Data Pertumbuhan Ekonomi, Data Persentase Kemiskinan, Data Indeks Persepsi Korupsi dan Data Indeks Pembangunan Manusia.

Tahun	Ketimpangan Pendapatan dalam Gini Rasio	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Kemiskinan (%)	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks Pembangunan Manusia
2014	0,414	5,02	10,96	34	0,691
2015	0,402	4,79	11,22	36	0,696
2016	0,394	5,02	10,86	37	0,7
2017	0,391	5,07	10,64	37	0,704
2018	0,384	5,06	9,82	38	0,707

Sumber : Badan Pusat Statistik dan World Bank, 2018

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia yang diukur dari rasio gini terus berlanjut hingga berada di level 0,384 pada tahun 2018. Level tersebut merupakan yang terendah sejak 2011.

Rasio gini Indonesia mengalami tren penurunan sejak tahun 2014. Rasio gini tercatat sebesar 0,414 pada tahun 2014, lalu turun menjadi 0,402 pada tahun 2015, turun kembali menjadi 0,394 pada tahun 2016. Kemudian, rasio gini pada tahun 2017 sebesar 0,391, dan turun lagi menjadi 0,384 pada tahun 2018.

Rasio gini menurun lantaran masyarakat lapisan terbawah mengalami kenaikan pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan lapisan di atasnya.

Peningkatan pengeluaran pada 40% masyarakat lapisan bawah tercatat mencapai 2,83%. Sedangkan kelompok menengah mengalami peningkatan pengeluaran sebesar 0,71%, dan peningkatan pengeluaran golongan atas 0,95%.

Dari data di atas terlihat pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 4,79 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 5,02 persen, lalu pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan sebesar 5,07 persen, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 5,06 persen.

Dari data di atas dapat dilihat persentase Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 10,95 persen mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,22 persen. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 10,86 persen dan pada tahun 2017 hingga 2018 jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan yaitu dari 10,64 persen menjadi 9,82 persen.

Pada data di atas terlihat bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 34. Pada tahun 2015 IPK Indonesia sebesar 36, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar 37, dan memiliki nilai yang sama pada tahun 2017 yaitu sebesar 37 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 38.

Berdasarkan data di atas indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 IPM di Indonesia sebesar 0,691 kemudian pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,696. Pada tahun 2016 IPM di Indonesia sebesar

0,700 kemudian terus meningkat di tahun 2017 sampai 2018 yaitu sebesar 0,704 dan 0,707.

Berdasarkan uraian ringkas latar belakang serta adanya dukungan hasil sejumlah penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mencoba mengamati sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yang berjudul: **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Indeks Persepsi Korupsi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.**Keunggulan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel korupsi sebagai variabel independen untuk melihat pengaruh korupsi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian penulis mengajukan sejumlah perumusan masalah yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan di dalam penelitian ini tidak mengambang, maka peneliti memerlukan batasan dalam melakukan sebuah penelitian:

1. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian yang hanya menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks persepsi korupsi (IPK) dan indeks pembangunan manusia (IPM).
2. Penelitian ini dilakukan di Indonesia tahun 1998-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat positif:

1. Bagi pemerintah hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi yang berguna dalam pengambilan kebijakan strategis dibidang perekonomian secara menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia.
2. Bagi akademisi hasil yang diperoleh dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang juga tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dengan permasalahan di dalam penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini terdapat beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yaitu menjelaskan tentang kerangka teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

-

Metodologi penelitian yaitu menjelaskan sebuah metodologi penelitian, dan data sumber penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH

Menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum dari wilayah yang dilakukan sebagai tempat penelitian serta menjelaskan variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut.

BAB V : HASIL PEMBAHASAN

Membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil tersebut berupa hasil olahan data dan hasil dari uji yang telah dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan kesimpulan dari penelitian serta saran yang diberikan setelah melakukan sebuah penelitian.